

Kode>Nama Rumpun Ilmu: 562/ Akuntansi

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**ANALISIS KOMPARASI INDEKS *INTERNET FINANCIAL*
REPORTING PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

Tahun ke 1 (satu) dari rencana 1 (satu) tahun

VERAWATY, SE, M.Sc, Ak. / 0017028201

CITRA INDAH MERINA, SE, Ak.,MM. / 0025098201

Dibiayai Oleh:

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sesuai dengan

**Surat Perjanjian Pelaksanaan Penungasan Penelitian Dosen Pemula Bagi Dosen
Perguruan Tinggi Swasta**

Nomor: 221/SP2H/PL/DIT. LITABMAS/V/2013/ tanggal 27 Juni 2013

UNIVERSITAS BINA DARMA

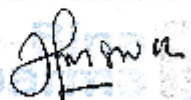
NOVEMBER 2013

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : ANALISIS KOMPARASI INDEKS INTERNET FINANCIAL
REPORTING PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Peneliti / Pelaksana
Nama Lengkap : VERAWATY S.E.,Ak.,M.Sc.
NIDN : 0017028201
Jabatan Fungsional :
Program Studi : Akuntansi
Nomor HP :
Surel (e-mail) : verawaty@mail.binadarma.ac.id
Anggota Peneliti (1)
Nama Lengkap : CITRA INDAH MERENA
NIDN : 0025098201
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS BINA DARMA
Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra :
Alamat :
Penanggung Jawab :
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 11.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp. 15.000.000,00

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi



(Dr. Irfi Suwarni, SE., M.Si.)
NIP/NIK 197012222005012003

Palembang, 25 - 11 - 2013,

Ketua Peneliti,


(VERAWATY S.E.,Ak.,M.Sc.)
NIP/NIK 198202172005012003

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian


(P.H. Salsono, S.T., M.Sc., Ph.D.)
NIP/NIK 110109348

RINGKASAN

Tren penggunaan internet sebagai media pengungkapan informasi juga berdampak pada sektor pemerintah. Pemerintah menempuh berbagai upaya antara lain dengan menerapkan sistem *e-government* (*elektronik government*). Melalui *e-government*, informasi publik bisa disampaikan oleh badan publik dengan lebih ekonomis, efektif, dan efisien. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan bagi *stakeholder* publik apakah *e-government* yang dimiliki telah dimaksimalkan pemanfaatan penggunaannya secara baik, sehingga tidak hanya pada tataran bahwa pemerintah daerah tersebut telah memiliki *e-government* saja, tetapi sampai pada optimalisasi pemanfaatannya termasuk dalam aspek akuntansinya. Fokus penelitian ini adalah pengungkapan keuangan sektor publik melalui media internet atau yang disebut sebagai IFR (*Internet Financial Reporting*).

Penelitian ini berusaha membandingkan kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Indonesia dengan menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000). Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk membandingkan kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Indonesia. Kontribusi yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu bagi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penerapan *e-government* dalam bidang akuntansi, yaitu IFR (*Internet Financial Reporting*) untuk memenuhi kewajibannya sebagai penyedia informasi publik, sedangkan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya sebagai bahan masukan atau referensi tambahan jika ingin mengembangkan penelitian yang berhubungan penerapan IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government*.

Populasi penelitian adalah semua pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan sampel penelitian dibagi menjadi dua. Kelompok pertama adalah semua pemerintah provinsi tingkat provinsi di Indonesia. Alasannya adalah pemerintah provinsi tentunya lebih disorot oleh masyarakat sehingga dihipotesiskan akan mengungkapkan informasi yang dimilikinya dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kota. Adapun kelompok kedua ditentukan berdasarkan kriteria tertentu atau *purposive sampling method*. Kriteria khusus tersebut adalah di setiap provinsi akan dipilih satu pemerintah kota yang merupakan daerah kategori paling luas, paling banyak penduduk, dan paling tinggi pendapatan perkapitanya. Hal ini berdasarkan penelitian Mussari dan Steccolini (2006) bahwa sampel yang bukan merupakan pemerintah dengan kota-kota yang besar dianggap tidak mendapat tuntutan tinggi tentang pengungkapan informasi laporan keuangannya. Selain itu kriteria umum untuk setiap kelompok sampel adalah memiliki *e-government* sampai dengan September 2013 dan *e-government* tersebut tidak dalam perbaikan (*maintenance*).

Data dikumpulkan melalui observasi dengan media internet terhadap ketersediaan *e-government* pada dua kelompok sampel yang akan dianalisis secara komparatif. Terakhir untuk melengkapi analisis atas data yang telah dikumpulkan, peneliti melakukan wawancara dengan praktisi-praktisi pemerintah daerah di Indonesia yang berwenang terkait dengan kebijakan IFR di daerahnya. Hal ini diperlukan karena penelitian ini tentunya akan bersifat eksploratif karena belum pernah ada penelitian yang sama dilakukan di Indonesia sebelumnya sehingga dukungan hasil wawancara terhadap beberapa praktisi pemerintah daerah tersebut akan memberikan *robustness aspect* terhadap hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pengujian statistik *Mann Whitney Test* untuk membandingkan komponen *content*, *timeliness*, *technology* dan *user support* antar kedua kelompok sampel yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kota.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Hibah Dosen Pemula Dikti dengan judul, “Analisis Komparasi Indeks *Internet Financial Reporting* Pemerintah Daerah di Indonesia”.

Sebuah karya penelitian sulit dikatakan sebagai sebuah karya usaha tunggal tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan penyusunan laporan akhir ini, penulis menerima banyak sekali bantuan berupa dorongan, masukan positif, bahkan kritik membangun dari berbagai pihak. Penulis merasa bersyukur karena dengan banyaknya bantuan tersebut telah sangat membantu penyusunan laporan ini, juga proses pembelajaran pada diri penulis dalam memahami apa yang telah dipelajari selama ini. Jadi pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Beberapa praktisi pemerintah daerah yang berwenang terkait dengan kebijakan IFR di daerahnya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bisa merespon pertanyaan-pertanyaan penelitian.
2. Semua rekan dosen di Universitas Bina Darma Palembang selalu memberikan semangat. Terima kasih yang tidak terhingga dari penulis atas segala masukan dan dorongannya untuk terus maju.
3. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan laporan ini. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Semoga amal baik dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini mendapat berkah dari Allah SWT. Tiada gading yang tak retak, penulis dengan berbesar hati akan menerima kritikan maupun saran yang membangun, serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keseluruhan hasil laporan ini. Akhir kata, penulis berharap karya penelitian yang masih memiliki keterbatasan ini dapat membuka sedikit celah, dan memberikan ide dan manfaat bagi pengembangan pengetahuan, serta berguna bagi semua pihak.

Palembang, 1 November 2013

Verawaty

Citra Indah Merina

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
RINGKASAN.....	3
PRAKATA	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
BAB 1. PENDAHULUAN.....	7
BAB 2.TINJAUAN PUSTAKA	
1. Pengungkapan Akuntansi di Sektor Publik	9
2. Sistem Informasi di Sektor Publik.....	10
3. Penelitian-Penelitian Terdahulu	11
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Manfaat Penelitian.....	13
BAB 4. METODE PENELITIAN	
1. Rancangan Penelitian	14
2. Variabel Penelitian	14
3. Tehnik Pengumpulan Data	15
3. Analisis Data.....	16
BAB 5. HASIL YANG DICAPAI	17
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	28
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN	29
DAFTAR PUSTAKA.....	31
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Indeks Aksesibilitas.....	15
Tabel 5.1 Hasil Survei (Observasi) terhadap <i>E-Government</i> Pemerintah Provinsi.....	19
Tabel 5.2 Hasil Survei (Observasi) terhadap <i>E-Government</i> Pemerintah Kota	20
Tabel 5.3 Statistik Deskriptif Kualitas <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR)	21
Tabel 5.4 Pengujian <i>Mann Whitney Test</i> untuk Komponen <i>Content</i>	22
Tabel 5.5 Pengujian <i>Mann Whitney Test</i> untuk Komponen <i>Timeliness</i>	23
Tabel 5.6 Pengujian <i>Mann Whitney Test</i> untuk Komponen <i>User Support</i>	24
Tabel 5.7 Pengujian <i>Mann Whitney Test</i> untuk Empat Komponen <i>Indeks Cheng</i>	25

BAB 1

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Selain itu, sekaligus dapat memperluas partisipasi publik karena masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif, baik dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan oleh pemerintah, perbaikan produktifitas, dan efisiensi birokrasi serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Teknologi yang dimaksud adalah internet yang merupakan teknologi informasi yang banyak menjanjikan kemudahan dan fasilitas. Melalui media ini, dapat diperoleh berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Keunggulan yang fundamental adalah tidak mengenal batas waktu dan wilayah. Selain itu, media informasi dan komunikasi ini dibandingkan dengan media lain, yaitu informasi yang didapatkan lebih murah, cepat, dan murah dengan jangkauan global.

Tren penggunaan internet sebagai media pengungkapan informasi juga berdampak pada sektor pemerintah. Pemerintah sangat menyadari hal ini karena itu pemerintah menempuh berbagai upaya antara lain dengan menerapkan sistem *elektronik government (e-government)* atau pemerintahan berbasis elektronik (Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003). Sistem ini dimaksudkan untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan pola ini, pemerintahan tradisional (*traditional government*) yang identik dengan *paper-based administration* ataupun pengerjaan secara manual mulai ditinggalkan.

E-government saat ini dimiliki hampir semua pemerintah daerah. Ditambah lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa masyarakat (pemohon informasi publik) berhak mendapatkan akses informasi (informasi publik) dari penyelenggara pemerintahan (badan publik). Melalui *e-government*, informasi publik bisa disampaikan oleh badan publik dengan lebih ekonomis, efektif, dan efisien.

Jika dikaitkan dengan sistem informasi, tuntutan akan ketersediaan dan aksesibilitas pelaporan keuangan di sektor publik tentunya akan lebih optimal jika dilakukan dengan perencanaan informasi strategis yang merupakan kompetensi teknologi informasi yang dikembangkan dari waktu ke waktu oleh bagian *Government Chief Information Officer*

(GCIO). Semakin lengkap komponen informasi (aspek *content*), semakin tercukupi kebutuhan akan informasi publik. Semakin tepat waktu laporan dipublikasikan, semakin handal informasi yang digunakan (aspek *timeliness*). Semakin variatif pemanfaatan teknologi, semakin aplikatif bagi *stakeholder* (aspek *technology*). Semakin optimal fitur-fitur yang menunjang penggunaan *e-government*, semakin baik sarana komunikasi kepada publik (aspek *user support*). Tentunya semua hal tersebut tidak akan bisa dilakukan oleh bagian keuangan pemerintah daerah saja tanpa dukungan GCIO atau setaranya dalam pemerintah daerah tersebut.

Pemerintah sebagai badan yang melakukan investasi pada teknologi informasi berupa *e-government* ini menyadari pentingnya untuk berupaya memuaskan kebutuhan akan informasi publik. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan bagi *stakeholder* publik apakah *e-government* yang dimiliki telah dimaksimalkan pemanfaatan penggunaannya secara baik, sehingga tidak hanya pada tataran bahwa pemerintah daerah tersebut telah memiliki *e-government* saja, tetapi sampai pada optimalisasi pemanfaatannya termasuk dalam aspek akuntansinya. Fokus penelitian ini adalah pengungkapan keuangan sektor publik melalui media internet atau yang disebut sebagai IFR (*Internet Financial Reporting*).

Pembahasan penelitian akan dikupas tentang optimalisasi pelaporan akuntansi dengan berfokus pada keunggulan diseminasi informasi laporan keuangan dengan pendekatan media internet, antara lain dapat didistribusikan lebih cepat (aspek *timeliness*) dan dapat dieksploitasi untuk lebih membuka diri dengan menginformasikan laporan keuangannya (aspek *disclosure*). Dengan kata lain kualitas pengungkapan pelaporan keuangan di sektor publik akan lebih optimal jika pelaporan keuangan menggunakan IFR (*Internet Financial Reporting*).

Berdasarkan pernyataan diatas, penelitian ini berusaha membandingkan kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Indonesia dengan menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000). Alasan pemilihan kelompok sampel karena pemerintah provinsi tentunya lebih disorot oleh masyarakat sehingga dihipotesiskan akan mengungkapkan informasi yang dimilikinya dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kota.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengungkapan Akuntansi di Sektor Publik

Pengungkapan atau pelaporan akuntansi sektor publik dengan menggunakan media *website* pemerintah (*e-government*) merupakan konten yang biasa disebut *Internet Financial Reporting* (IFR). Menurut Oyelere et al (2003), IFR merupakan kombinasi kapasitas dan kapabilitas multimedia internet untuk mengkomunikasikan secara interaktif tentang informasi keuangan.

Secara konsep, menurut GASB No. 34 (1999) yang berisi revisi signifikan mengenai model pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik, menyatakan bahwa laporan tahunan keuangan pemerintah akan berguna pada *stakeholder* publik sebagai bentuk pertanggungjawaban, termasuk kualitas pengungkapannya. Penyebaran laporan ini merupakan tanggung jawab dan dikendalikan oleh pemerintah daerah. Tentunya salah satu cara yang paling efektif dari segi cara, efisien dari segi waktu, dan ekonomis dari segi biaya untuk agen pemerintah yang diotorisasi untuk tanggung jawab tersebut untuk menyebarkan informasi ini, internet dengan aplikasi IFR melalui *e-government* merupakan alternatif yang tepat.

Berdasarkan penelitian Laswad et al (2005), IFR masih merupakan *voluntary disclosure* di sektor publik. Di Indonesia juga demikian, regulasi Inpres No. 3 Tahun 2003 yang mengamanatkan implementasi penyelenggaraan pemerintah yang didukung oleh teknologi informasi dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) hanya mengatur apa saja yang termasuk informasi publik yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala dengan cara yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat tanpa menyebutkan apa media yang disarankan.

Suatu ukuran umum dari kualitas pengungkapan dan pelaporan dalam komunitas profesional dan akademik akuntansi pemerintahan di USA adalah program GFOA's *Certificate of Achievement* (Giroux dan McLelland, 2003). Daerah yang dianugerahi *Certificate of Achievement* (CoA) telah mengarah pada suatu komitmen untuk level pengungkapan dan pelaporan keuangan yang lebih tinggi. Di Indonesia, institusi yang berwenang untuk melakukan pemeringkatan *e-government* terbaik adalah Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Depkominfo) melalui Direktorat *E-Government* (Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika). Pemeringkatan *e-Government*

Indonesia (PeGI) merupakan acuan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah, memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah, sekaligus untuk mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK secara nasional. Namun belum ada institusi di Indonesia yang berwenang untuk menilai kualitas pengungkapan dan pelaporan keuangan atau IFR dalam *website* pemerintah (*e-government*) karena Depkominfo telah secara eksplisit menyatakan bahwa tidak terdapat *formal link* antara program PeGI dengan ketersediaan konten IFR ataupun indikator kualitas pengungkapan dan pelaporan keuangan lainnya dalam *e-government* sebagai salah satu indikator pemerinkatan.

Karena belum ada proksi yang tepat untuk mengukur kualitas pengungkapan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet (*e-government*) seperti diatas pada sektor publik di Indonesia, peneliti akan mencoba mengadopsi kualitas pengungkapan dengan menggunakan indeks yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000) yang merupakan hasil penelitian pada sektor privat. Dengan menggunakan indeks ini akan bisa dinilai optimalitas penggunaan *e-government* dalam ranah akuntansi sektor publik dan sistem informasi.

2. Sistem Informasi di Sektor Publik

Seperti sektor privat, sektor publik pun telah menggunakan internet. Pada semua level dan adopsinya dalam bentuk *e-government*, internet berperan signifikan dalam administrasi publik, terutama dalam pelaporan keuangan sektor publik. Melalui *e-government*, pegawai pemerintah dapat menyediakan informasi dan melakukan pelayanan kepada *stakeholder* internal dan eksternal melalui *website*. Fokus penelitian ini, pemerintah daerah tingkat provinsi dan kota di Indonesia, tentunya bukan pengecualian untuk tren ini.

Komunikasi berskala besar yang ditawarkan dalam *website* seperti *e-government* ini memberikan kesempatan untuk demokrasi digital dan akuntabilitas yang lebih transparan bagi penduduk dan *stakeholder* lainnya (Style dan Tennyson, 2007). Pertimbangan bahwa akuntabilitas secara implisit diharapkan ada dalam setiap tujuan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, *e-government* berperan penting dalam demokratisasi informasi kinerja pemerintah dengan menyediakan informasi keuangan yang paling baik dan secara potensial lebih mudah diakses oleh *stakeholder* publik.

Iklim pertumbuhan akuntabilitas memusatkan perhatian pada administrator pemerintah daerah dengan pendekatan sistem informasi. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah daerah di USA telah mengadopsi struktur pemerintahan dengan *city manager* sebagai alat untuk untuk meningkatkan kinerja administratif dengan menunjuk *webmaster* atau yang

dalam sektor privat disebut CIO atau *Chief Information Officer* (Giroux dan McLelland, 2003) dan dalam sektor pemerintah disebut dengan GCIO atau *Government Chief Information Officer* (Nugroho dalam Supangkat, 2008). Daerah-daerah yang menggunakan pendekatan administratif ini telah menunjukkan suatu kinerja keuangan yang superior (Giroux dan McLelland, 2003) dan tingkatan pengungkapan akuntansi yang lebih luas dibandingkan daerah-daerah lain dengan struktur pemerintahan yang berbeda (Robbins dan Austin, 1986 dan Giroux dan McLelland, 2003 serta Zimmerman, 1997 dan Ingram dan DeJong, 1987).

Sebagai agen dari pemerintahan daerah, GCIO mempunyai suatu dorongan untuk menunjukkan kompetensi profesional kepada konstituen daerah (DPRD). Penyediaan laporan keuangan daerah pada *e-government* memperbolehkan agen tersebut untuk menyajikan suatu dokumen yang menyediakan banyak ukuran atas kinerja mereka untuk *stakeholder* yang lebih luas daripada yang mungkin dilakukan melalui metoda pendistribusian tradisional. Dorongan untuk menunjukkan kompetensi administratif profesional yang dikombinasikan dengan ekspektasi dan kenaikan permintaan *stakeholder* untuk data pelaporan keuangan dapat terwujud salah satunya apabila daerah-daerah tersebut memiliki GCIO yang akan menyediakan data laporan keuangan di *website* mereka dengan sistem informasi yang handal. Menurut penelitian Verawaty dan Halim (2009), di Indonesia, belum ada unit dalam pemerintah daerah yang berperan sebagai GCIO. Walaupun terdapat unit yang menangani masalah telematika, atau mengelola *e-government* tetapi tidak sekaligus menjadi koordinator teknologi informasi.

Karena di Indonesia belum ada GCIO sehingga belum terdapat proksi yang tepat untuk mengukur kualitas pengungkapan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet (*e-government*), penelitian ini akan membahas kualitasnya, yaitu menilai bentuk pengungkapan yang lebih baik, penyajian konten dalam bentuk pdf atau html, pemanfaatan teknologi seperti penggunaan media teknologi multimedia seperti *analysis tools* (contohnya, *Excel's Pivot Table*), fitur-fitur lanjutan (seperti implementasi "*Intelligent Agent*" atau XBRL) ataupun *user support* seperti media pencarian dan navigasi/*search and navigation tools* (seperti FAQ, *links to homepage*, *site map*, *site search*).

3. Penelitian-Penelitian Terdahulu

Literatur-literatur IFR yang ada mengindikasikan bahwa bahwa sama seperti sektor privat, sektor publik juga menggunakan internet sebagai mekanisme untuk menyebarkan laporan dan pengungkapan yang disediakan bagi *stakeholder* publik. Hal ini mendukung

pernyataan Wagenhofer (2003) bahwa IFR tidak mungkin melepaskan diri dari pengungkapan akuntansi sektor publik.

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis penelitian. Terdapat beberapa penelitian dari luar negeri yang membahas mengenai ketersediaan laporan keuangan melalui media internet atau IFR pada sektor publik, yaitu Groff dan Pittman (2004) meneliti mengenai praktek IFR pada 100 pemerintah daerah terbesar di USA. Laswad et al (2005) menguji IFR secara sukarela pada pemerintah daerah di New Zealand. Kemudian Styles dan Tennyson (2007) meneliti *accessibility* pelaporan keuangan semua pemerintah daerah USA di internet. Adapun penelitian dari Indonesia yaitu penelitian Verawaty dan Abdul Halim (2009) meneliti ketersediaan IFR pada tingkat pemerintah provinsi di Indonesia, Verawaty (2010) meneliti ketersediaan IFR pada pemerintah daerah di Sumatera Selatan, dan Verawaty dan Merina (2011) meneliti aksesibilitas IFR pemerintah provinsi di Indonesia dengan mengaitkannya dengan penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Penelitian terakhir, Verawaty dan Merina (2011) hanya mengungkapkan mengenai aksebilitas *content* (isi), yaitu berapa langkah yang diperlukan untuk menemukan laporan keuangan dalam *e-government*. Adapun mengenai aspek *timeliness* (ketepatanwaktuan), *technology* (pemanfaatan teknologi), dan *user support* (dukungan bagi pengguna) tidak dibahas. Penelitian ini akan lebih jauh membahas kualitas pengungkapannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan indeks Cheng et al. (2000).

Isu penelitian mengenai kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR pada sektor pemerintah belum pernah diangkat di Indonesia. Akan tetapi penelitian yang sama pada sektor privat sudah dilakukan, yaitu Almilia (2009) dan Mannan (2009). Hal ini terjadi karena penggunaan teknologi informasi pada sektor pemerintah yang ditandai dengan penggunaan *e-government* baru marak lima tahun terakhir ini saja.

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk membandingkan kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Indonesia dengan menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu bagi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan penerapan *e-government* dalam bidang akuntansi, yaitu IFR (*Internet Financial Reporting*) untuk memenuhi kewajibannya sebagai penyedia informasi publik, sedangkan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya sebagai bahan masukan atau referensi tambahan jika ingin mengembangkan penelitian yang berhubungan penerapan IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government*.

BAB 4

METODE PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan pada *hypothetico-deductive method*. Menurut Sekaran (2006), penelitian dengan menggunakan metoda ini melibatkan tujuh tahap, yaitu:

1. *Observation* (Observasi)
2. *Preliminary Information Gathering* (Pengumpulan Data Awal)
3. *Theory Formulation* (Perumusan Teori)
4. *Hypothesis* (Perumusan Hipotesis)
5. *Further Scientific Data Collection* (Pengumpulan Data Saintifik Selanjutnya)
6. *Data Analysis* (Analisis Data)
7. *Deduction* (Deduksi)

2. Variabel Penelitian

Adapun berdasarkan Cheng et al. (2000), variabel-variabel yang digunakan untuk menilai kualitas pelaporan keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) dalam hipotesis ini adalah *content* (isi), *timeliness* (ketepatanwaktuan), *technology* (pemanfaatan teknologi), dan *user support* (dukungan bagi pengguna). Berikut penjelasan mengenai masing-masing variabel penelitian:

1. **Content**, yaitu meliputi komponen informasi keuangan seperti laporan neraca, rugi laba, arus kas, perubahan posisi keuangan serta laporan keberlanjutan seperti *footnotes*, *partial sets of financial statements* dan/atau *financial highlights* yang meliputi *summary financial statements* dan inti dari *financial statements* tersebut yang dipublikasikan melalui *e-government*. Informasi keuangan yang diungkapkan dalam bentuk html memiliki skor yang tinggi dibandingkan dalam format pdf, karena informasi dalam bentuk html lebih memudahkan pengguna informasi untuk mengakses informasi keuangan tersebut menjadi lebih cepat.
2. **Timeliness** atau ketepatanwaktuan, yaitu informasi yang siap digunakan para pemakai sebelum kehilangan makna dan kapasitas dalam pengambilan keputusan. Ketika *e-government* dapat menyajikan informasi yang tepat waktu, maka semakin tinggi indeksnya.

3. **Technology** atau pemanfaatan teknologi, yaitu komponen ini terkait dengan pemanfaatan teknologi yang ada dalam *e-government* yang tidak dapat disediakan oleh media laporan cetak serta penggunaan media teknologi multimedia, *analysis tools* (contohnya, *Excel's Pivot Table*), fitur-fitur lanjutan (seperti implementasi *Intelligent Agent* atau XBRL). Semakin banyak fitur, semakin tinggi indeksnya.

4. **User Support** atau dukungan bagi pengguna, yaitu komponen ini terkait dengan fasilitas yang mempermudah pengguna untuk menemukan laporan keuangan di dalam *e-government*. Indeks *e-government* daerah semakin tinggi jika pemerintah daerah mengimplementasikan secara optimal semua sarana dalam *website* seperti media pencarian dan navigasi/*search and navigation tools* (seperti FAQ, *links to homepage*, *site map*, *site search*).

Adapun untuk menilai keempat komponen tersebut, berikut Tabel 4.1 yang merupakan Indeks Aksesibilitas (Style dan Tennyson, 2007):

A	<i>Financial Highlights</i>	menyajikan <i>summary financial statements</i> dalam bentuk tabel ringkas atau uraian ringkas dan mudah diakses
B	<i>Financial Statement</i>	menyajikan komponen Laporan Keuangan yang lengkap dan komprehensif
C	<i>Html Format</i>	bentuk html memiliki skor yang tinggi dibandingkan dalam format pdf karena informasi lebih mudah dan cepat diakses
D	<i>Data for Prior Years</i>	IFR juga menyajikan laporan tahun sebelumnya sebagai pembandingan
E	<i>Up Date</i>	IFR untuk tahun berjalan (misal disajikan persemester biar selalu update dan tepat waktu)
F	<i>Analysis Tools</i>	menyediakan <i>analysis tools</i> (contohnya, <i>Excel's Pivot Table</i>)
G	Fitur Lanjutan	menyediakan fitur-fitur lanjutan (seperti implementasi <i>Intelligent Agent</i> atau XBRL)
H	<i>Site Search</i>	<i>search engine</i> di dalam situsnya bisa digunakan untuk mencari LK
I	<i>Link Page</i>	menyediakan link ke IFR di dalam situsnya
J	<i>FAQ or Contact</i>	menyediakan fasilitas tanya jawab atau email/phone pengelola

Keterangan:

- Total indeks adalah 10 poin. *Content* memiliki maksimal 3 poin (A-C), *timeliness* adalah maksimal 2 poin (D-E), *technology* 2 poin (F-G), dan *user support* adalah 3 poin (H-J).

3. Teknik Pengumpulan Data

Populasi penelitian adalah semua pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan sampel penelitian dibagi menjadi dua. Kelompok pertama adalah semua pemerintah provinsi tingkat provinsi di Indonesia. Alasannya adalah pemerintah provinsi tentunya lebih disorot oleh masyarakat sehingga dihipotesiskan akan mengungkapkan informasi yang dimilikinya dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kota.

Adapun kelompok kedua ditentukan berdasarkan kriteria tertentu atau *purposive sampling method*. Kriteria khusus tersebut adalah di setiap provinsi akan dipilih satu pemerintah kota yang merupakan daerah kategori paling luas, paling banyak penduduk, dan paling tinggi pendapatan per kapitanya. Hal ini berdasarkan penelitian Mussari dan Steccolini (2006) bahwa sampel yang bukan merupakan pemerintah dengan kota-kota yang besar dianggap tidak mendapat tuntutan tinggi tentang pengungkapan informasi laporan keuangannya. Selain itu kriteria umum untuk setiap kelompok sampel adalah memiliki *e-government* sampai dengan September 2013 dan *e-government* tersebut tidak dalam perbaikan (*maintenance*).

Data dikumpulkan melalui observasi dengan media internet terhadap ketersediaan *e-government* pada dua kelompok sampel yang akan dianalisis secara komparatif. Terakhir untuk melengkapi analisis atas data yang telah dikumpulkan, peneliti melakukan wawancara dengan praktisi-praktisi pemerintah daerah yang berwenang terkait dengan kebijakan IFR di daerahnya. Hal ini diperlukan karena penelitian ini tentunya akan bersifat eksploratif karena belum pernah ada penelitian yang sama dilakukan di Indonesia sebelumnya sehingga dukungan hasil wawancara terhadap beberapa praktisi pemerintah daerah akan memberikan *robustness aspect* terhadap hasil penelitian. Selain itu, tentunya data sekunder lainnya adalah berbagai sumber yang menjadi tinjauan pustaka dalam membangun hipotesis dan sekaligus mengujinya, antara lain buku-buku teks, artikel-artikel ilmiah ataupun populer, koran, serta internet.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pengujian statistik *Mann Whitney Test* untuk membandingkan komponen *content*, *timeliness*, *technology* dan *user support* antar kedua kelompok sampel yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Pengujian ini digunakan untuk menguji signifikansi - hipotesis komparatif dua sampel independent yang datanya berbentuk ordinal. Uji ini mirip dengan uji anova pada data parametrik hanya saja tidak dipenuhi anggapan kenormalan (tanpa uji asumsi klasik) dari data. Analisis yang digunakan berdasarkan ranking data, bukan data itu sendiri.

BAB 5

HASIL YANG DICAPAI

Hasil survei yang telah dilakukan pada periode penelitian terkait dengan *website* yang dimiliki oleh sampel penelitian, yaitu 66 pemerintah daerah di Indonesia, 33 pemerintah provinsi dan 33 pemerintah kota terpilih berdasarkan *purposive sampling*, menunjukkan bahwa 90,91% *e-government* pemerintah provinsi dalam status *online* atau hanya 30 *e-government*. Adapun hanya 78,79% *e-government* pemerintah kota dalam status *online*, yaitu 26 *e-government*, sisanya 9,09% *e-government* yang dimiliki dalam status *error* (kemungkinan dalam status *under maintenance*), yaitu 3 *e-government* dan 12,12% pemerintah kota bahkan belum memiliki *e-government*, yaitu 4 pemerintah kota.

Hasil survei juga menunjukkan adanya disparitas praktek pengungkapan informasi keuangan melalui *e-government* dan masih sedikitnya pemerintah daerah memanfaatkan penggunaan teknologi internet. Dari total 90,91% *e-government* pemerintah provinsi, hanya 56,67% yang melakukan *Internet Financial Reporting* (IFR). Adapun dari total hanya 78,79% *e-government* pemerintah kota, hanya 42,31% yang melakukan *Internet Financial Reporting* (IFR). Kualitas pengungkapan dilakukan oleh kedua kelompok sampel sangat bervariasi.

Berdasarkan Tabel 5.1 yang merupakan hasil survei (observasi) terhadap *e-government* pemerintah provinsi, komponen paling tinggi adalah *user support*. Dalam komponen ini dinilai apakah di dalam *e-government* memiliki fitur *Site Search* (*search engine* di dalam situsnya bisa digunakan untuk mencari laporan keuangan), *Link Page* (menyediakan link ke IFR di dalam situsnya), dan *FAQ or Contact* (menyediakan fasilitas tanya jawab atau email/phone pengelola). Fitur terakhir paling banyak disediakan di dalam *e-government*.

Berdasarkan poin aksesibilitas, komponen kedua dan ketiga adalah *timeliness* dan *technology*. Namun yang paling menarik adalah tidak tersedianya fitur *technology* di semua *e-government* pemerintah provinsi. Penilaian untuk komponen ini adalah berdasarkan *Analysis Tools*, yaitu menyediakan *analysis tools* (contohnya, *Excel's Pivot Table*) dan Fitur Lanjutan (menyediakan fitur-fitur lanjutan, yaitu seperti implementasi *Intelligent Agent* atau XBRL).

Jika dilihat per provinsi, DKI Jakarta merupakan provinsi yang paling unggul. Dari 10 poin, DKI Jakarta meraih 7 poin. Kemudian disusul oleh provinsi DIY, Gorontalo, dan Kalimantan Tengah dengan nilai masing-masing 5 poin. Adapun provinsi mana yang paling rendah nilai poinnya, yaitu 1 poin, ternyata sangat dominan, yaitu 40% dari total keseluruhan sampel penelitian.

Tabel 5.1 Hasil Survei (Observasi) terhadap *e-Government* Pemerintah Provinsi

No	NAMA RKN	Sats	RUMAH SATS										Jl
			Gat			Tm		Tmo		LsSppt			
	Sats	HS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Bali	olire										1	1wifr
2	Banten	olire										1	1wifr
3	Bengkulu	dlire											0steaor
4	Dad Hsinava Ngdata	olire	1	1		1					1	1	5ifr
5	Dad Kusulokadadata	olire	1	1	1	1				1	1	1	7ifr
6	Gorontalo	olire		1	1		1				1	1	5ifr
7	Jambi	olire		1		1					1	1	4ifr
8	Jawa Barat	olire		1		1					1	1	4ifr
9	Jawa Tengah	olire										1	1fileifndkiasadkes
10	Jawa Timur	olire										1	1fileifndkiasadkes
11	Kinantan Barat	olire										1	1fileifndkiasadkes
12	Kinantan Selatan	olire										1	1fileifndkiasadkes
13	Kinantan Tengah	olire		1		1				1	1	1	5ifr
14	Kinantan Timur	olire										1	1wifr
15	Kepulauan Bangka Belitung	olire		1		1					1	1	4ifr
16	Kepulauan Riau	olire	1		1						1	1	4fileifndkiasadkes
17	Lampung	olire									1	1	2fileifndkiasadkes
18	Maluku	olire										1	1wifr
19	Maluku Utara	dlire											0steaor
20	Nggo Ad Dauslam	olire										1	1wifr
21	Ns Tenggara Barat	olire		1	1	1						1	4ifr
22	Ns Tenggara Timur	olire									1	1	2wifr
23	Papua	olire										1	1wifr
24	Papua Barat	olire											0wifr
25	Riau	olire					1				1	1	3ifrtalas
26	Slaves Barat	olire									1	1	2fileifndkiasadkes
27	Slaves Selatan	olire										1	1wifr
28	Slaves Tengah	olire									1	1	2fileifndkiasadkes
29	Slaves Tenggara	olire										1	1wifr
30	Slaves Utara	olire									1	1	2wifr
31	Sunda Barat	olire									1	1	2wifr
32	Sunda Selatan	dlire											0steaor
33	Sunda Utara	olire										1	1wifr

Tabel 5.2 Hasil Survei (Observasi) terhadap e-Government Pemerintah Kota

No	NAMA	Status	FASILITAS										Jumlah
			Galeri			Tenda		Tenda		Lapangan			
	Supermarket		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Dipasar	online											1 1 orang
2	Sarang	online											1 1 orang
3	Bangkulu	online											1 1 orang
4	Yagdata	online		1		1					1	1	4 orang
5	Jakarta	online	1	1	1	1				1	1	1	7 orang
6	Gondok	online									1	1	2 orang
7	Jambi	online										1	1 orang
8	Batubung	online		1		1					1	1	4 orang
9	Sarang	online									1	1	2 file info kiosk kiosk
10	Sulawesi	online		1		1				1	1	1	5 orang
11	Pontianak	online									1	1	2 orang
12	Banjarnegara	online										1	1 file info kiosk kiosk
13	Pangkalaya	offline											0 user 0
14	Samarinda	online										1	1 orang
15	Pangkalharang	offline											0 Blunad website
16	Tejungharang	offline											0 Blunad website
17	Batukapung	online										1	1 orang
18	Akron	online		1		1	1				1	1	5 orang
19	Sidhi	offline											0 Blunad website
20	Batukach	online		1	1	1					1	1	5 orang
21	Makassar	online									1	1	2 file info kiosk kiosk
22	Karang	online										1	1 orang
23	Jayapura	online										1	1 orang
24	Makassar	online											0 Blunad website
25	Pekalongan	offline											0 user 0
26	Majunga	online										1	1 orang
27	Makassar	online											0 user 0
28	Palu	online									1	1	2 file info kiosk kiosk
29	Kendari	online		1		1					1	1	4 orang
30	Makassar	online										1	1 orang
31	Pangkal	online									1	1	2 orang
32	Pangkal	online										1	1 orang
33	Makassar	online										1	1 orang

Berdasarkan Tabel 5.2, hanya 78,79% *e-government* pemerintah kota dalam status *online*, sisanya 9,09% *e-government* yang dimiliki dalam status error (kemungkinan dalam status *under maintenance*), dan 12,12% pemerintah kota bahkan belum memiliki *e-government*. Jadi hanya ada 26 pemerintah kota yang sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jika dikaitkan kualitas pengungkapan berdasarkan penelitian Cheng et al (2000), hasilnya sama seperti pada kelompok sampel pemerintah provinsi, yaitu komponen yang paling tinggi adalah *user support*. Komponen ini menilai apakah di dalam *e-government* memiliki fitur *Site Search* (*search engine* di dalam situsnya bisa digunakan untuk mencari laporan keuangan), *Link Page* (menyediakan link ke IFR di dalam situsnya), dan *FAQ or Contact* (menyediakan fasilitas tanya jawab atau email/phone pengelola). Fitur terakhir juga yang paling banyak disediakan di dalam *e-government*.

Berdasarkan poin aksesibilitas, komponen kedua dan ketiga adalah *timeliness* dan *technology*. Namun yang paling menarik adalah juga tidak tersediakan fitur *technology* di semua *e-government* pemerintah kota. Penilaian untuk komponen ini adalah berdasarkan *Analysis Tools*, yaitu menyediakan *analysis tools* (contohnya, *Excel's Pivot Table*) dan Fitur Lanjutan (menyediakan fitur-fitur lanjutan, yaitu seperti implementasi *Intelligent Agent* atau XBRL. Adapun untuk komponen *timeliness*, hanya tujuh pemerintah kota yang mengoptimalkannya, yaitu Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Surabaya, Ambon, Banda Aceh, dan Kendari. Hal ini berarti 21,2 % dari kelompok sampel pemerintah kota.

Jika dilihat per kota, Jakarta merupakan kota yang paling unggul. Dari 10 poin, DKI Jakarta meraih 7 poin. Kemudian disusul oleh kota Surabaya dan Ambon dengan nilai masing-masing 5 poin. Adapun provinsi mana yang paling rendah nilai poinnya, yaitu 1 poin, ternyata sangat dominan, yaitu 39,4 % dari total keseluruhan kelompok sampel penelitian ini.

Tabel 5.3 Statistik Deskriptif Kualitas *Internet Financial Reporting* (IFR)

Variabel	Kelompok Sampel	N	Mean
<i>CONTENT</i>	Pemerintah Provinsi	30*	0.07
	Pemerintah Kota	26**	0.05
<i>TIMELINES</i>	Pemerintah Provinsi	30	0.03
	Pemerintah Kota	26	0.03
<i>TECHNOLOGY</i>	Pemerintah Provinsi	30	0
	Pemerintah Kota	26	0
<i>USER SUPPORT</i>	Pemerintah Provinsi	30	0.10
	Pemerintah Kota	26	0.11
TOTAL	Pemerintah Provinsi	30	0.20
	Pemerintah Kota	26	0.19

Keterangan:

30* : Dari 33 *e-government* pemerintah provinsi, hanya ada 30 dalam status online.

28** : Dari 33 *e-government* pemerintah kota terpilih, hanya ada 26 dalam status online.

Berdasarkan Tabel 5.3 secara deskriptif, *e-government* yang dimiliki pemerintah provinsi mengungkapkan informasi yang dimilikinya dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kota walaupun perbedaan di antara keduanya tidak begitu jauh, yaitu dengan selisih mean 0,1 saja.

Berikutnya merupakan pengujian secara statistik. Karena penelitian ini membandingkan dua kelompok sampel dari populasi yang sama, sehingga jumlahnya pun harus sama. Berdasarkan Bab 4, kriteria umum untuk setiap kelompok sampel adalah memiliki *e-government* sampai dengan September 2013 dan *e-government* tersebut tidak dalam perbaikan (*maintenance*). Jadi yang lolos untuk uji tes, untuk pemerintah provinsi kecuali Bengkulu, Maluku Utara, dan Sumatera Selatan, sedangkan pemerintah kota kecuali Palangkaraya, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Sofifi, Manokwari, Pekanbaru, dan Makasar.

Berikut hasil pengujian statistik *Mann Whitney Test* untuk membandingkan komponen *content*, *timeliness*, *technology* dan *user support* antar kedua kelompok sampel yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kota:

Tabel 5.4. Pengujian *Mann Whitney Test* untuk Komponen *Content*

Ranks				
KELOMPOK_ PEMERINTAH		N	Mean Rank	Sum of Ranks
CONTENT	0	30	29.13	874.00
	1	26	27.77	722.00
	Total	56		

Test Statistics ^a	
	CONTENT
Mann-Whitney U	371.000
Wilcoxon W	722.000
Z	-.393
Asymp. Sig. (2-tailed)	.694

Test Statistics ^a	
	CONTENT
Mann-Whitney U	371.000
Wilcoxon W	722.000
Z	-.393
Asymp. Sig. (2-tailed)	.694

a. Grouping Variable:

KELOMPOK_PEMERINTAH

Dari output **Rank**, dapat kita lihat bahwa nilai mean untuk pemerintah provinsi lebih besar daripada nilai pemerintah kota (**29,13 > 27,77**). Dari pengujian *Mann Whitney Test*, yaitu output “**Test Statistic^a**”, nilai statistik uji Z yang kecil yaitu **-0,393** dan nilai **sig.2-tailed adalah 0,694 > 0,05**. Hal ini berarti hasil uji tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian tidak ada perbedaan pengungkapan informasi pada *e-government* yang dimilikinya antara pemerintah provinsi dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kota untuk komponen *content*.

Tabel 5.5. Pengujian Mann Whitney Test untuk Komponen Timeliness

Ranks				
KELOMPOK_PEMERINTAH		N	Mean Rank	Sum of Ranks
TIMELINESS	0	30	28.75	862.50
	1	26	28.21	733.50
	Total	56		

Test Statistics ^a	
	TIMELINESS
Mann-Whitney U	382.500
Wilcoxon W	733.500
Z	-.157
Asymp. Sig. (2-tailed)	.875

a. Grouping Variable:

KELOMPOK_PEMERINTAH

Dari output **Rank**, dapat kita lihat bahwa nilai mean untuk pemerintah provinsi sedikit lebih besar daripada nilai pemerintah kota (**28,75 > 28,21**). Dari pengujian **Mann Whitney Test**, yaitu output “**Test Statistic^a**”, nilai statistik uji Z yang kecil yaitu **-0,157** dan nilai **sig.2-tailed** adalah **0,875 > 0,05**. Hal ini berarti hasil uji tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian tidak ada perbedaan pengungkapan informasi pada *e-government* yang dimilikinya antara pemerintah provinsi dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kota untuk komponen *timeliness*.

Tabel 5.6. Pengujian Mann Whitney Test untuk Komponen User Support

Ranks				
	KELOMPOK_ PEMERINTAH	N	Mean Rank	Sum of Ranks
USER_SUPPORT	0	30	28.22	846.50
	1	26	28.83	749.50
	Total	56		

Test Statistics ^a	
	USER_SUPPORT
Mann-Whitney U	381.500
Wilcoxon W	846.500
Z	-.155
Asymp. Sig. (2-tailed)	.877

a. Grouping Variable:

KELOMPOK_PEMERINTAH

Dari output **Rank**, dapat kita lihat bahwa nilai mean untuk pemerintah kota sedikit lebih besar daripada nilai pemerintah provinsi (**28,83 > 28,22**). Dari pengujian **Mann Whitney Test**, yaitu output “**Test Statistic^a**”, nilai statistik uji Z yang kecil yaitu **-0,155** dan nilai **sig.2-tailed** adalah **0,877 > 0,05**. Hal ini berarti hasil uji tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian tidak ada perbedaan pengungkapan informasi pada *e-government* yang dimilikinya antara pemerintah provinsi dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kota untuk komponen *user support*.

Adapun pengujian untuk komponen *technology* tidak bisa dilakukan karena, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota sama sekali tidak mengoptimalkannya. Jadi nilainya nol atau tingkat signifikansinya adalah 1.

Berikut tabel pengujian simultan untuk keempat komponen:

Tabel 5.7 Pengujian *Mann Whitney Test* untuk Empat Komponen Cheng et al (2000)

		Ranks		
	KELOMPOK_ PEMERINTAH	N	Mean Rank	Sum of Ranks
CONTENT	0	30	29.13	874.00
	1	26	27.77	722.00
	Total	56		
TIMELINESS	0	30	28.75	862.50
	1	26	28.21	733.50
	Total	56		
TECHNOLOGY	0	30	28.50	855.00
	1	26	28.50	741.00
	Total	56		
USER_SUPPORT	0	30	28.22	846.50
	1	26	28.83	749.50
	Total	56		

Test Statistics ^a				
	CONTENT	TIMELINESS	TECHNOLOGY	USER_SUPPORT
Mann-Whitney U	371.000	382.500	390.000	381.500
Wilcoxon W	722.000	733.500	741.000	846.500
Z	-.393	-.157	.000	-.155
Asymp. Sig. (2-tailed)	.694	.875	1.000	.877

a. Grouping Variable: KELOMPOK_PEMERINTAH

Berdasarkan Tabel 5.7, semua komponen tidak signifikan. Artinya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Indonesia dengan menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000).

Dukungan atas fenomena diatas belum bisa dijelaskan secara empiris karena penelitian ini merupakan penelitian eksploratif. Namun secara normatif, berdasarkan sisi regulasi, *e-government* telah diperkenalkan itu dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang kemudian disusul oleh regulasi-regulasi berikutnya yang relevan tentang penggunaan teknologi informasi di pemerintahan. Namun, tentang bagaimana standardisasi *content*-nya belum bersifat *mandatory*.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa praktisi pemerintah, komponen *timeliness*, yaitu tentang apakah *e-government* juga menyajikan IFR untuk laporan tahun sebelumnya sebagai pembanding dan IFR untuk tahun berjalan (misal disajikan per semester biar selalu update dan tepat waktu), dianggap tidak perlu dilakukan karena ada badan publik lain, yaitu yang lebih berkompeten melakukannya, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai badan yang melakukan penilaian atas laporan keuangan pemerintah. *Website* BPK dianggap yang paling tepat melakukan transparansi atas LK pemerintah. Walaupun dalam ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/DJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran yang salah satu isinya adalah menyiapkan menu konten “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah” dalam *website* resmi pemerintah provinsi. Hasil observasi melalui penelitian ini mengindikasikan pemerintah provinsi belum bisa menerapkannya.

Adapun jika menyangkut *technology* dan *user support*, menurut Verawaty dan Halim (2009), *e-government* merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis/industri, belum banyak di sektor publik. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari *e-government*, terutama tentang *Analysis Tools* dan fitur-fitur lanjutan. Menurut Sosiawan (2008), untuk mengatasi hambatan langkanya SDM yang handal, maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Secara pragmatis, hendaknya pelatihan tersebut bersifat *inhouse* di tingkat penyelenggara pemerintah daerah agar diperoleh pemahaman dan *literacy* yang menyeluruh di kalangan pegawai pemerintah daerah. *Inhouse training* tersebut dapat melibatkan para pakar di daerah maupun di lain daerah serta kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yang ada. Sementara di tingkat pusat perlu diselenggarakan secara sentralisasi (oleh Depkominfo melalui Diklat terpadu) dan secara desentralisasi dengan membuat pusat-pusat diklat di lembaga pendidikan milik Depdagri atau lembaga pendidikan milik swasta yang bekerjasama dengan Depkominfo ataupun perguruan tinggi. Selain itu diklat ini dapat dilaksanakan sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah yang lebih tahu kebutuhannya sendiri berkaitan dengan implementasi *e-government*.

Peningkatan SDM pegawai untuk implementasi *e-government* perlu penanganan yang serius dan dilakukan bersama oleh pemerintah, perguruan tinggi, dan pihak swasta. Yang paling penting dan utama untuk disampaikan dalam pelatihan tersebut adalah perlu diubah pandangan tentang keberhasilan pelaksanaan *e-government* bukan terletak pada teknologinya tetapi bergantung pada kemampuan manusia yang mengelolanya. Pada sisi manajerial perlu dibuat suatu model pengelolaan *e-government*, baik untuk tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada struktur organisasi yang ada di departemen, kementerian dan lembaga pemerintah non-departemen perlu dipertegas bagian dari organisasi yang menangani *e-government* disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi yang telah ada agar tidak terjadi kerancuan di dalam pengelolaan dan implementasi *e-government* di pemerintahan daerah.

Implikasi penelitian ini adalah pentingnya suatu lembaga yang mengatur dan menilai kualitas pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui *e-government*. Tentu saja ini juga akan berimplikasi pada perlunya dilakukan regulasi terhadap pengungkapan optimalisasi pemanfaatan *e-government*, baik bagi perusahaan provinsi, maupun pemerintah daerah kota dan kabupaten.

BAB 6

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

(untuk laporan tahunan)

Rencana tahapan berikutnya akan lebih berfokus pada hal-hal dibawah ini:

1. Penelitian akan dibuat dalam format artikel

Penelitian ini akan memenuhi komitmen luaran yang telah ditentukan pada tahapan sebelumnya. Penelitian akan dibuat dalam format yang lebih ringkas atau sesuai dengan publikasi untuk kebutuhan seminar ataupun jurnal yang dituju.

2. Temuan pada penelitian ini akan dikembangkan pada Penelitian Hibah Kompetisi

Penelitian ini hanya merupakan awal dari penelitian eksploratif, yaitu hanya membandingkan tingkat pengungkapan informasi yang dimiliki dengan format dan kualitas berdasarkan komponen *content*, *timeliness*, *technology* dan *user support* antar kedua kelompok sampel yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Untuk penelitian berikutnya seperti Hibah Kompetisi dengan dana dan waktu yang lebih banyak, diharapkan akan dianalisis determinan atau faktor penentu yang mempengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas informasi publik melalui *e-government*.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Penelitian ini berusaha membandingkan kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Indonesia dengan menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al. (2000). Alasan pemilihan kelompok sampel karena pemerintah provinsi tentunya lebih disorot oleh masyarakat sehingga dihipotesiskan akan mengungkapkan informasi yang dimilikinya dengan format dan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kota.

Dengan hasil survei, yaitu 78,79% *e-government* pemerintah kota dalam status *online*, sisanya 9,09% *e-government* yang dimiliki dalam status error (kemungkinan dalam status *under maintenance*) dan 12,12% pemerintah kota bahkan belum memiliki *e-government*. Hasil survei juga menunjukkan adanya disparitas praktek pengungkapan informasi keuangan melalui *e-government* dan masih sedikitnya pemerintah daerah memanfaatkan penggunaan teknologi internet. Dari total 90,91% *e-government* pemerintah provinsi, hanya 56,67% yang melakukan *Internet Financial Reporting* (IFR). Adapun dari total hanya 78,79% *e-government* pemerintah kota, hanya 42,31% yang melakukan *Internet Financial Reporting* (IFR). Kualitas pengungkapan dilakukan oleh kedua kelompok sampel sangat bervariasi.

Berdasarkan hasil pengujian dengan *Mann Whitney Test*, semua komponen tidak signifikan. Artinya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kualitas pengungkapan pelaporan keuangan atau IFR (*Internet Financial Reporting*) pemerintah provinsi dan pemerintah kota di Indonesia dengan menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Cheng et al (2000).

Adapun berdasarkan hasil wawancara, permasalahan di lapangan tentang kurangnya optimalisasi terhadap penggunaan *e-government* untuk bidang akuntansi sektor publik (keuangan daerah) antara lain adalah mengenai regulasi-regulasi yang relevan tentang penggunaan teknologi informasi di pemerintahan, yaitu tentang bagaimana standarisasi *content* yang menyangkut akuntansi keuangan daerah yang masih belum bersifat *mandatory*. Pelimpahan kewajiban diseminasi kinerja keuangan pemerintah daerah untuk komponen *timeliness* adalah kepada pihak BPK. Hal ini setidaknya bisa diakomodir melalui optimalisasi *hiperlink* dari *e-government* pemerintah daerah tersebut ke *website* BPK jika tidak ingin didesiminasikan ke dalam *e-government* yang dimiliki.

Adapun jika menyangkut *technology* dan *user support*, untuk mengatasi hambatan langkanya SDM yang handal, maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi karena keberhasilan pelaksanaan *e-government* bukan terletak pada teknologinya tetapi bergantung pada kemampuan manusia yang mengelolanya.

2. SARAN

Implikasi penelitian ini adalah pentingnya suatu lembaga yang mengatur dan menilai kualitas pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui *e-government*. Tentu saja ini juga akan berimplikasi pada perlunya dilakukan regulasi terhadap pengungkapan optimalisasi pemanfaatan *e-government*, baik bagi perusahaan provinsi, maupun pemerintah daerah kota dan kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, Luciana Spica, 2009. *Analisa Komparasi Indeks Internet Financial Reporting pada Website Perusahaan Go Publik di Indonesia*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009.
- Almilia,, 2009. *Eksplorasi Pemanfaatan Technology dan User Support Pada Website Perusahaan Go Publik Di Indonesia*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009.
- Cheng, A. Lawrence, S and Coy, D., 2000. *Measuring the Quality of Corporate Financial Websites: A New Zealand Study*. Paper presented at the 12th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues – Beijing.
- Giroux, G. and McLelland, A.J., 2003. *Governance Structure and Accounting at Large Municipalities*. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- GASB (Governmental Accounting Standards Boards), 1999. *Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting*. Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: *Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Government*. Norwalk.
- Groff, JF, and Pitman, M.K, 2004. *Municipal Financial Reporting on the World Wide Web: A Survey of Financial Data Displayed on the Official Websites of the 100 largest US Municipalities*. *Journal of Government Financial Management*.
- Ingram, R.W., and Dejong, D.V., 1987. *The Effect of Regulation on Local Government Disclosure Practises*. *Journal of Accounting and Public Policy*,6: 245-270.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001. *Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika)*.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.
- Laswad, Fawzi, Fisher, Richard and Oyelere, Peter, 2005. *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Mannan, Siti Sofiyah Abdul, 2009. *e-Corporate Governance Disclosure dan Kinerja Perusahaan pada Periode Bearish: Studi Kasus di Pasar Modal Indonesia*. Tesis UGM.
- Mussari, Riccardo and Steccolini, Ileana, 2006. *Using the Internet for Communicating Performance Information*. *Public Money and Management Journal*.
- Oyelere, Peter, Laswad, Fauzi, and Fisher, Richard, 2003. *Determinant of Internet Financial Reporting by New Zealand Companies*. *Journal of International Financial Management and Accounting*.
- Robbins, W.A. and Austin, K.R., 1986. *Disclosure Quality in Governmental Financial Report: An Assessment of the Appropriateness of A Compound Measure*. *Journal of Accounting Research*.
- Sekaran, Uma, 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Penebit Salemba Empat.
- Sosiawan, Edwi Arief, 2008. *Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia*. <http://edwi.dosen.upnyk.ac.id>.

- Styles, Alan K. and Tennyson, Mack, 2007. *The Accessibility of Financial Reporting of US Municipalities on the Internet. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Spring.
- Supangkat, Suhono Harso, 2008. *CIO. Chief Information Officer. Peran Kepemimpinan Pengelola Informasi untuk Pertumbuhan Organisasi*. Penerbit ICT (The Indonesian ICT Institutes).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. *Keterbukaan Informasi Publik*.
- Verawaty dan Halim, Abdul, 2009. *The Availability of IFR (Internet Financial Reporting) through E-Government as Public Transparency, Participation, and Accountability Means In Indonesia. Master Thesis of UGM*.
- Verawaty, 2010. *Ketersediaan IFR (Internet Financial Reporting) melalui e-government sebagai Sarana Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Publik di Sumatera Selatan*. Penelitian DIPA Dikti Tahun 2010.
- Verawaty dan Merina, Citra Indah, 2011. *Aksesibilitas Informasi Publik Pemerintah Provinsi di Indonesia (Telaah Penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik)*. Penelitian DIPA Dikti Tahun 2011.
- Wagenhofer, A., 2003. *Economic Consequences of Internet Financial Reporting. Schmalenbach Business Review*, 55 (4): 262-279.
- Zimmerman, J., 1977. *The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. Journal of Accounting Research*, 15: 107-144.

	(Perencanaan Pajak) Sebagai Strategi Efisiensi Beban Pajak		Desember 2007 ISSN: 1411-1616	
3	<i>Earnings Management</i> Ditinjau dari Sudut Pandang <i>Ethics</i>	2009	Jurnal “MBiA”, Hal. 95- 106, Vol. 9 No. 2 Agustus 2009 ISSN: 1411-1616	Mandiri
4	<i>E-Procurement</i> sebagai Jaringan Pengadaan Barang dan Jasa	2010	Jurnal “MBiA”, Hal. 01- 14, Vol. 10 No. 1 April 2010 ISSN: 1411-1616	Mandiri
5	Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI	2010	Jurnal “MBiA”, Hal. 89- 104, Vol. 10 No. 2 Agustus 2010 ISSN: 1411-1616	LPPM Universitas Bina Darma
6	Ketersediaan IFR (<i>Internet Financial Reporting</i>) melalui <i>E- Government</i> sebagai Sarana Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Publik di Sumatera Selatan	2010	Kompetisi Peneliti Muda Kopertis Wilayah II (Jurnal “Mandiri” Kopertis Wilayah II Jurnal Mandiri)	DIPA Kopertis Wilayah II
7	Aksesibilitas Informasi Publik Pemerintah Provinsi di Indonesia (Telaah Penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik)	2011	Kompetisi Peneliti Muda Kopertis Wilayah II (Jurnal “Mandiri” Kopertis Wilayah II Jurnal Mandiri)	DIPA Kopertis Wilayah II
8	<i>The Accessibility of Public Information of Local Government through E-Government in Indonesia</i>	2012	(Pemakalah) Seminar Internasional “ <i>International Public Sector Conference (IPSC) 2012</i> ”, Kinabalu, Malaysia	Mandiri
9	<i>The Availability of IFR (Internet Financial Reporting) through E- Government as Public Transparency, Participation, and Accountability Means In Indonesia</i>	2012	(Pemakalah) Seminar Internasional “ <i>The 13th Malaysia- Indonesia Conference on Economics, Management and Accounting (MICEMA, 2012)</i> ”, Palembang, Indonesia Prosiding ISBN: 979-587- 429-2	Mandiri
11	Determinan Aksesibilitas <i>Internet Financial</i>	2012	(Pemakalah) Seminar Nasional	Mandiri

	<i>Reporting pada Website Perbankan Go Public di Indonesia</i>		“Pengelolaan Industri Kreatif sebagai Penunjang Stabilitas Sistem Keuangan”, Universitas Atmajaya, (2012), Jakarta, Indonesia Prosiding ISBN: 978-602-18933-0-2	
12	<i>Clustering Formation and National Network of E-Procurement: A Case Study in Indonesia</i>	2012	(Pemakalah) Seminar Internasional “ <i>International Conference on Business Management and Information Systems (ICBMIS 2012</i> ” di Singapore, <i>International Journal of Academic Conference Proceedings (IJACP); Recent Trends in Business Management and Information Systems</i> , 2012, Academic Reference Series, No. 48, page 353. Prosiding ISBN: 978-93-82563-39-6 Prosiding online: http://www.newhealth.in/ojs/index.php/ICBMIS/article/view/83 ISSN: 2164-263X	Mandiri
13	<i>Public Audit sebagai Saluran Akuntabilitas Pemerintah</i>	2012	Jurnal “MBiA”, Vol. 11 No. 1 April 2012 ISSN: 1411-1616	Mandiri
14	Mengembangkan Kegiatan Belajar Aktif dan Mandiri Melalui Penerapan <i>Cooperative Learning</i> (Studi Kasus: Mata Kuliah Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio)	2012	Jurnal “MBiA”, Vol. 11 No. 2 Agustus 2012 ISSN: 1411-1616	Mandiri
15	<i>The Accessibility Determinants Of Internet Financial Reporting In Banking Website Listed In Indonesia Stock Exchange</i>	2013	(Pemakalah) Seminar Internasional “ <i>8th Asian Business Research Conference</i> ”, Bangkok, Thailand Prosiding online: http://www.wbiworldcomp	Mandiri

			ro.com/pages/previous_confo/bangkok-conference-2013	
16	<i>The Accessibility Determinants of Internet Financial Reporting of Local Government: Further Evidence from Indonesia</i>	2013	(Pemakalah) Seminar Internasional "Fourth Asia Pasific Business Research Conference", Singapore Prosiding online: http://www.wbiworldconpro.com/pages/previous_confo/singapore-conference-2013 Jurnal: World Review of Business Research, ISSN: 1838-3955 (Printed Version), ISSN: 1839-1176 (Online) (dalam proses)	Mandiri

2. Biodata Anggota Peneliti

A. Identitas Diri

Nama : Citra Indah Merina, SE, Ak.
 NIK/NIDN : 198202172005012003/0025098201
 Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 25 September 1982
 Agama / Jenis Kelamin : Kristen / Wanita
 Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a
 Jenjang Fungsional : Asisten Ahli
 Unit Kerja : Dosen PNS Dpk pada Universitas Bina Darma Palembang
 Alamat Kantor : Jalan A Yani No. 12 Plaju Palembang
 E-mail : citra@mail.binadarma.ac.id
 Pendidikan Terakhir : Strata II Universitas Bina Darma

B. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Strata Satu	Strata Dua
Perguruan Tinggi	Universitas Sriwijaya	Universitas Bina Darma
Bidang Ilmu	Akuntansi	Manajemen
Tahun Masuk-Lulus	2000-2004	2012-2013
Judul Skripsi/Tesis	Penilaian Pengendalian Intern atas Penjualan dan Penerimaan kas dalam Hubungannya dengan pemeriksaan Akuntansi	

	pada PT. Hotama Mediphar	
Nama Pembimbing	Drs. Ahmad Rivai, Ak dan Dewa Saputra, SE, MM.	Dr. Lin Yan Syah, SE, M.Si dan Dr. Hardiyansyah, SE, MAP.

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Daftar Penelitian	Tahun Pelaksanaan	Publikasi	Sumber Dana
1	Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI	2010	Jurnal "MBiA", Hal. 89-104, Vol. 10 No. 2 Agustus 2010 ISSN: 1411-1616	LPPM Universitas Bina Darma
2	Aksesibilitas Informasi Publik Pemerintah Provinsi di Indonesia (Telaah Penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik)	2011	Kompetisi Peneliti Muda Kopertis Wilayah II	DIPA Kopertis Wilayah II
3	<i>The Factors that Effect to the Disclosure of Corporate Social Responsibility in Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange</i>	2012	(Pemakalah) <i>The 13th Malaysia-Indonesia Conference on Economics, Management and Accounting</i> (MICEMA, 2012), Indonesia ISBN : 979-587-429-2	Mandiri
4	Mengembangkan Kegiatan Belajar Aktif dan Mandiri Melalui Penerapan <i>Cooperative Learning</i> (Studi Kasus: Mata Kuliah Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio)	2012	Jurnal "MBiA", Vol. 11 No. 2 Agustus 2012 ISSN: 1411-1616	Mandiri